

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sebagai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan (Suatu kajian terhadap implementasi Pasal 31 UUD 1945) / Suartini

Suartini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269584&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Program wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu program yang mendukung jalannya pembangunan dalam bidang pendidikan, yang mana kontribusi yang amat sangat besar dalam pembangunan bangsa adalah pendidikan. Berbagai negara di dunia ikut melaksanakan program pendidikan dasar sebagai upaya dari pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan itu dijabarkan pada amanat konstitusi yaitu seperti yang tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.

Permasalahan yang dikaji pada penulisan tesis ini adalah bagaimana hubungan program wajib belajar pendidikan dasar dengan implementasi pasal 31 UUD 1945, bagaimana hubungan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dan faktor-faktor apa saja yang menghambat jalannya penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar.

Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif, dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui: bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kumpulan makalah, tulisan dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan, bahan hukum tersier berupa kamus dan lain sebagainya. Alat pengumpulan data selain melalui studi dokumen, juga dilakukan wawancara dengan informan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan, metode pengolahan data yaitu dengan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis.

Hubungan program wajib belajar pendidikan dasar dengan implementasi pasal 31 UUD 1945 adalah pemenuhan hak pendidikan atas warga negara Indonesia sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan pemerintah yang mendukung jalannya program pendidikan dasar telah terealisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan hambatan dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar adalah faktor ekonomi, sosial-budaya bangsa Indonesia.

<hr>

ABSTRACT

Education accountability program is a program which supports an education development program, which provides the best contribution towards nation's development. Many nations in the world has join this basic education program as an effort to fulfill the right of a citizen to obtain education. Education is on of several efforts to create nation's objective which consists in the Forth paragraph of Undang-Undang Dasar 1945. Which also lies in the constitutional amendment such as article 31 of UUD 1945.

Research issue will be observed in this thesis is the relationship between the basic education accountability program by implementing the article 31 of UUD 1945, and the relationship of government policy in implementing the basic education accountability program to achieve the sustainability and expansion of education access, and what factors which could limit the implementation of basic education accountability program.

Method was used in this thesis is the normative research method, by collecting data from research literature as the secondary data. Data was obtained through : primary source which is the constitution and international convention which has been ratified, secondary source, such as literatures, papers, and articles related to the research issue; and lastly, tertiary source such as dictionary and others. Data collection instrument was using documentary study, and interview with the informants to obtain related information toward research's issue, and the data processing method was using the qualitative method and analytic descriptive.

The relationship of the basic accountability education program with the implementation of the article 31 of UUD 1945 is the fulfillment of educational rights of the people

of Indonesia as an effort to enhance the education standard of the nation, and the government policies to sustain this basic education accountability program has been realized, and several obstacles towards the basic education accountability program are as follows : economic factors, and the socio-culture of the Republic of Indonesia.